

Rekrutmen Politik dalam Proses Penentuan Keputusan Pencalonan Anis Baswedan – Sandiaga Uno di Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Rofiqi

Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia

e-mail: rofiqi@gmail.com

ABSTRACT

This research is drawn upon Anies Baswedan candidacy for Jakarta gubernatorial election which was supported by Gerindra and PKS even though he was a Jokowi proponent back in the 2014 presidential election. Despite the contradiction, Anies Baswedan was still appointed in the Jakarta gubernatorial candidacy. This research will be focusing on how the process of political recruitment behind Anies Baswedan-Sandiaga Uno's appointment was conducted. Using political recruitment theory by Rush and Althoff, and elite theory by Nazaruddin Syamsuddin and Mosca, this research argues that their candidacy was done enclosed. Which mean, they did not get to deal with an internal selection of Gerindra, nor the wide selection (pemira) by PKS. Therefore, this research suggests that the Anies-Sandi gubernatorial candidacy was arranged by the elite trio: Jusuf Kalla, Prabowo Subianto and Shohibul Iman.

Keywords: *Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Political Elite, Jakarta Gubernatorial Election 2017.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengusungan Anis Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, Anis Baswedan merupakan pendukung Jokowi yang merupakan lawan politik Prabowo Subianto dalam pilpres tahun 2014. Karena itulah, perlu untuk dikaji mengenai rekrutmen politik terhadap Anis Baswedan - Sandiaga Uno sebagai Cagub - Cawagub DKI Jakarta pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian ini ada teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff. Teori elit yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsuddin dan Mosca. Temuan penelitian ini adalah rekrutmen politik terhadap Anis Baswedan dilakukan secara tertutup. Yakni tidak melalui penjarangan diinternal Partai Gerindra dan tidak melalui Pemilu Raya (Pemira) diinternal PKS. Pencalonan Anis Baswedan - Sandiaga Uno sebagai Cagub - Cawagub lebih didasarkan pada pengaruh para elit. Yakni : Jusuf Kalla, Prabowo Subianto dan Shohibul Iman.

Kata-Kata Kunci: *Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Elit Politik, Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.*

Dinamika politik dalam rekrutmen di Pilkada DKI Jakarta yang sempat memunculkan nama Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Basuki Tjahja Purnama akhirnya menghasilkan tiga poros utama. Yakni, Poros Cikeas menghasilkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, Poros Teuku Umar menghasilkan Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dan Poros Kertanegara menghasilkan pasangan Anis Baswedan – Sandiaga Uno. Ketiga poros tersebut secara tidak langsung mewakili tiga kekuatan politik di Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto.

Ketiga pasangan calon ini memenuhi persyaratan dukungan politik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang - Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang.

Dalam pasal 39 menyebutkan peserta pemilihan (a) calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota yang diusulkan oleh partai politik dan/atau, (b). Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Sedangkan, mengenai syarat dukungan sendiri sebagaimana termaktub dalam pasal 40 yakni partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam pasal 41 disebutkan (1) calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud. Besarnya syarat untuk perseorangan, memaksa para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, menempuh jalur partai politik untuk mendaftarkan diri. Begitupula para calon kepala daerah dalam pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Tidak ada yang menempuh jalur perseorangan, tiga pasangan yang maju dalam pilgub DKI Jakarta, kesemuanya melalui jalur partai politik.

Tabel 1.1 Jumlah Kursi DPRD Jakarta Dalam Dukungan di Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

NO	NAMA CALON	PARTAI PENDUKUNG	PEROLEHAN KURSI	JUMLAH KURSI
I	Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni	Partai Demokrat	10 Kursi	28 Kursi
		PKB	6 Kursi	
		PPP	10 Kursi	
		PAN	2 Kursi	
II	Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat	PDIP	28 Kursi	52 Kursi
		Partai Golkar	9 Kursi	
		Partai Nasdem	5 Kursi	
		Partai Hanura	10 Kursi	
III	Anis Baswedan – Sandiaga Uno	Partai Gerindra	15 Kursi	26 Kursi
		PKS	11 Kursi	

Dari tabel I.I tersebut sangatlah jelas bahwa pasangan Anis Baswedan – Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi menarik, sebab hubungan antara Anis Baswedan dengan Prabowo Subianto tidaklah harmonis. Saat Anis menjadi juru bicara dan tim inti kemenangan Jokowi - JK, Anis menyerang pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan tuduhan diusung oleh sejumlah partai politik (parpol) yang dilakoni para mafia, seperti dugaan kasus korupsi migas, haji, impor daging, Alquran, dan lumpur Lapindo (Putra 2014).

Tuduhan dari Anis tersebut cukuplah keras. Sehingga, ketika ia diusung oleh Partai Gerindra menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, menimbulkan kehebohan politik. Apalagi dinamika politik saat itu, seperti nuansa pilpres. Sebab elit – elit parpol ikut berpartisipasi. Otoritas Ketua Umum partai politik saat itu, sangat terasa kewenangannya dalam menentukan siapa yang akan diusung sebagai cagub – cawagub DKI Jakarta. Oleh karena itulah, penentuan Anis menjadi cagub DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan lawan dari Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang unik. Seakan menegaskan bahwa tidak ada kawan dan lawan sejati dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan semata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekrutmen partai politik, memiliki corak yang berbeda antara satu partai dengan partai lainnya, sehingga masing- masing partai memiliki daya nalar dan analisis yang berbeda. Menurut Rush dan Althoff, proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka” (Rush dan Phillip Althoff 2007). Dikarenakan setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda, maka ada banyak faktor yang mendasari seseorang dapat direkrut oleh suatu partai, dengan pengertian bahwa partai politik menyesuaikan kebutuhan partai terhadap kader seperti apa yang mereka inginkan. Dengan prosedur seperti itu, setiap individu yang direkrut tentunya memiliki bakat atau kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk mengisi jabatan politik.

Sejalan dengan Rush dan Althoff, Lili Romli juga menguraikan pola rekrutmen partai tersebut (Romli 2005). *Pertama*, Model rekrutmen terbuka, artinya semua

warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya, model rekrutmen ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan elite politiknya. Biasanya model rekrutmen ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibilitas dan mempunyai integritas tinggi.

Kedua, model rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri serta berdasarkan kedekatan, kedekatan itu bisa berupa hubungan darah, golongan, etnis dan lainnya. Tokoh lain seperti Mosca melihat bahwa seorang yang dikatakan elit merupakan suatu minoritas yang memiliki penguasaan terhadap mayoritas dengan fakta bahwa terjadi secara terorganisir. Misalnya, dalam suatu partai politik. Kekuasaan minoritas tersebut, tidak dapat dilawan oleh masing masing individu dan diantara minoritas pun dipercaya bahwa terdapat individu - individu yang unggul dan memiliki atribut nyata yang sangat dihargai dan berpengaruh pula terhadap suatu komunitas atau organisasi di mana mereka hidup. Sedangkan menurut, Nazaruddin Syamsuddin, elite politik adalah elitnya para politisi yaitu tokoh puncak diantara para pelaku kegiatan politik (Syamsuddin 1993)

Makna elit dalam partai politik juga hampir mirip dengan oligarki partai apabila berbicara mengenai rekrutmen partai politik. Dalam situasi saat ini, kecenderungan oligarki dalam rekrutmen yang terjadi di partai politik sering terjadi. Oligarki dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan partai yang hanya di dominasi oleh kalangan elite (Romli 2008). Pengambilan keputusan atau penentuan terjadi ditingkat elite partai atau yang berada di posisi struktural teratas. Sebagian besar partai politik masih menggunakan cara - cara oligarki dalam suatu keputusan yang tidak jarang sangat bertentangan dengan situasi atau keinginan dari masyarakat atau struktural dibawahnya. Gesekan sering terjadi dimana aspirasi yang datangnya dari *grassroot* tidak sejalan dengan kebijakan atau keputusan partai. Kecenderungan oligarki juga bisa berbentuk masuknya orang - orang yang dianggap dekat dengan petinggi partai. Alasan - alasan subjektifitas maupun objektifitas biasanya digunakan oleh para elit tersebut.

Berbicara elit dalam sebuah partai politik, maka kelompok ini dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar, artinya bahwa mereka bukan orang biasa saja. Para elit merupakan orang yang memiliki kedudukan dan juga jabatan yang kuat dalam suatu struktur partai politik. Ketua umum partai politik di tingkat pusat biasanya dapat disebut seorang elite politik. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembuatan kebijakan yang lebih banyak merupakan kebijakan elit atau pemimpin partai. Elit partai atau pemimpin partai politik tersebut, bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkannya, salah satunya seperti penentuan calon yang akan diusung untuk mengikuti suatu pemilihan kepada daerah (pilkada). elite partai merupakan pemegang peranan utama dan mempunyai hak prerogratif untuk

menentukan calon walaupun proses yang terjadi di tingkat daerah sudah melalui mekanisme partai dan telah menghasilkan calon tertentu.

Menjelang pendaftaran Cagub - Cawagub DKI Jakarta tahun 2012, proses politik yang terjadi diantara partai politik mulai memanas. Belum ada partai satupun yang mendeklarasikan Cagub - Cawagubnya. Mereka saling menimbang berbagai peluang dan mencari keputusan terbaik untuk partai politiknya.

Lobi - lobi politik dari elit - elite setiap partai politik juga terus dilakukan hingga tahap akhir menjelang pendaftaran calon. Bagi partai politik besar, pengambilan keputusan pada detik - detik terakhir pendaftaran pasangan Cagub dapat mengindikasikan bahwa proses politik yang terjadi sangat kencang dan membuat perdebatan yang cukup panas karena mereka sangat berkepentingan atas pilkada DKI Jakarta ini seperti Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Gerindra dan PKS sebagai sebuah organisasi politik, dapat mengajukan pilihan calon Gubernur - calon Wakil Gubernur bagi rakyat seperti dalam perannya. Partai Gerindra dan PKS harus dapat mengajukan pasangan Cagub dan Cawagub terbaiknya. Dalam faktanya, tidak mudah bagi partai politik untuk dapat menemukan pasangan terbaik karena berbagai kepentingan tentu akan mengiringinya.

Telah dijelaskan bahwa pemilihan Gubernur di DKI Jakarta menjadi target bagi setiap partai politik untuk dapat dimenangkan, tak terkecuali bagi Partai Gerindra. Kemenangan dalam pilkada tersebut juga menjadi kemenangan bagi partai politik untuk tingkat eksekutif disuatu daerah. Posisi eksekutif/kepala daerah jelas sangat vital peranannya dan sangat strategis secara politik. Karena itu, partai politik dengan segala cara akan berusaha untuk memenangkan pilkada.

Usaha Partai Gerindra untuk memenangkan pilgub DKI Jakarta tentu perlu didukung oleh keseluruhan unsur yang terdapat di Partai Gerindra, terutama unsur pengurus/kader Partai Gerindra di DKI Jakarta. Dalam kenyataannya, perannya masih sangat dibutuhkan walaupun orientasi pemilih terhadap calon kepala daerah sudah berdasarkan atas figur calon. Kader Partai Gerindra DKI Jakarta dapat menjadi tali penghubung segala program yang ditawarkan Cagub Partai Gerindra nantinya serta dapat menjadi mesin untuk memenangkan Cagub - Cawagub tersebut.

Kader - kader di Jakarta tentu telah faham mengenai fenomena sosial politik yang terdapat di masyarakat terkait pilgub. Disamping itu, para kader pastinya juga memiliki jaringan politik lokal yang cukup banyak untuk dapat membantu proses pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra. Perannya yang cukup penting juga harus diimbangi dengan mengakomodir usulan yang muncul dari mereka.

Dalam Mekanisme pemilihan Cagub di Partai Gerindra, kader Partai Gerindra DKI Jakarta turut serta dilibatkan dalam prosesnya. Peran yang diberikan tersebut telah disusun dalam peraturan partai dengan porsi yang berbeda - beda. Pemberian peran kepada kader Jakarta digunakan untuk memberi nilai - nilai demokrasi diinternal partai dalam proses pengambilan keputusan, menjadi sebuah konsolidasi serta dapat menjadi konsolidasi yang hendak dibangun untuk

pilkada apabila Partai Gerindra tidak kuat dalam menghadapi berbagai dinamika yang muncul pada arus bawah partai.

Peran yang diberikan Partai Gerindra benar benar dilakukan dari kepengurusan tingkat bawah. Sebagai kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Partai Gerindra hanya memberikan peran mengusulkan nama - nama dan alasan yang muncul di Masyarakat kepada kepengurusan ditingkat bawah. Sebab Partai Gerindra menginginkan munculnya nama bakal calon pemimpin yang diharapkan masyarakat Jakarta yang dianggap cukup sejalan dengan garis - garis perjuangan partai.

Pada bulan desember 2015 di Gelanggang Senen Jakarta, DPD Partai Gerindra mengundang seluruh struktur partai, dari tingkat ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC) dan dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se Jakarta. ada sekitar 800 kader yang hadir waktu itu. Mereka menuliskan nama siapa yang akan diusulkan oleh Partai Gerindra dalam Pilgub DKI Jakarta. Nama - nama yang akan diusulkan diprioritaskan dari kader, baru dari tokoh eksternal partai.

Terjaring hari itu 8 nama. Dari kader internal Partai Gerindra, yakni ; Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, Mohammad Sanusi, Biem Benjamin, Ahmad Muzani. Dari eksternal partai muncul Ridwan Kamil, Sjafrie Sjamsoeddin dan Saefullah. Nama - nama ini dipertimbangkan oleh Partai Gerindra untuk dicalonkan menjadi Gubernur .

Pada hari jumat, 12 Februari 2016, Partai Gerindra mengumpulkan semua tokoh yang mendeklarasikan diri atau didaulat sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. pertemuan itu dibalut dengan konsep silaturahmi dan diskusi bersama dengan tajuk membangun Jakarta. Mereka yang diundang diantaranya ; Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, Mohammad Sanusi, Biem Benjamin, Ahmad Muzani, Ridwan Kamil, Sjafrie Sjamsoeddin dan Saefullah, Adyaksa Dault, Abraham Lunggana, Nachrawi Ramli, Marco Kusumawijaya, Ichsanuddin Noorsy, Yusril Ihza Mahendra, Boy Sadikin, Mischa Hasnaeni Moein, Ahmad Syahroni, Ahmad Dhani (diusulkan oleh PKB sebagai Wakil Gubernur) (Aritasius dan Ratnawati 2017).

Sebagai agenda lanjutan dari penjaringan yang dilakukan terhadap 8 nama itu, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta melalui Ketua Tim Penjaringan Tetap Bakal Cagub DKI Jakarta, mengundang 8 nama yang muncul dalam temu kader. Mereka diundang bersilaturahmi untuk menandatangani komitmen sosialisasi dirinya selama 8 bulan dan taat pada aturan seleksi. Metode penilaian siapa yang akan direkomendasikan oleh tim penjaringan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yakni siapa yang lebih banyak melakukan sosialisasi ke struktur partai dan ke Masyarakat, maka dia yang akan direkomendasikan ke DPP. Catatannya sosialisasi tersebut dilakukan secara sukarela oleh bakal calon yang bersangkutan dan dengan menggunakan biaya sendiri.

Saat diundang untuk penandatanganan komitmen, Ridwan Kamil mengirimkan surat. Tidak bisa hadir dan mengundurkan diri. Sedangkan Syafrie juga tidak bisa datang dengan alasan sedang mengajar. Sementara, Ahmad Muzani berhalangan. Dari delapan nama tersebut menyisakan lima nama yakni Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, Mohammad Sanusi, Biem Benjamin dan Saefullah. Kelima bakal calon tersebut menandatangani komitmen. Dan setelah penandatanganan komitmen, mereka bergerak untuk melakukan sosialisasi. Penjaringan sendiri

bukanlah kebijakan partai secara menyeluruh. Tapi *local wisdom* dan berdasarkan restu dari Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Dari *start* pertama sampai pertengahan, Sjafrie tidak sosialisasi, begitupula dengan Ahmad Muzani. Hanya saja, ketika bakal calon yang lain sudah 4 bulan melakukan sosialisasi, Sjafrie meminta bertemu dengan ketua tim penjarangan. Sjafrie mengungkapkan memiliki izin dari keluarga dan menyatakan siap untuk menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Sebelumnya, ketika awal namanya muncul, dia tidak menyatakan siap untuk menjadi bakal calon dari Partai Gerindra dan tidak menandatangani komitmen mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh tim penjarangan. Pasca menyatakan siap dan menandatangani komitmen, Sjafrie melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Sandiaga Uno melakukan sosialisasi. Ia menggunakan dana pribadi untuk bersosialisasi ke masyarakat dan ke kader struktural partai. Hampir 600 titik sosialisasi yang dilakukan oleh Sandi. Ia bertemu dengan seluruh elemen dari masyarakat DKI Jakarta. Dari nama – nama tersebut tersebut pada akhirnya mengerucut pada Sandi, Sjafrie dan Sanusi. Ketiga nama itulah yang direkomendasikan oleh DPD DKI Jakarta ke DPP Partai Gerindra. Namun, saat nama sudah ada di DPP, Mohammad Sanusi ditangkap KPK sehingga gugur dan mengerucut dua nama yakni Sandi dan Sjafrie.

Ketika DPD sudah merekomendasikan nama ke DPP, Yusril datang menemui Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan ketua Tim Penjarangan berdasarkan perintah Prabowo Subianto. Akhirnya untuk nama Yusril dikirim juga oleh DPD Partai Gerindra DKI Jakarta untuk menggantikan nama Sanusi. Hanya saja, waktu itu Partai Gerindra tidak mencari calon wakil. Tapi Yusril menggandeng sendiri, bermanuver sendiri menggandeng wakilnya yakni Saefullah (Sekda DKI Jakarta). Sjarief (Ketua Tim Penjarangan) dan M. Taufik (Ketua DPD DKI Jakarta) tersinggung dengan cara Yusril tersebut. Sebab Yusril membuat peraturan sendiri.

Di Kantor DPP Partai Gerindra, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta diminta untuk melaporkan hasil penjarangan. Ketua Tim Penjarangan pun memaparkan hasil dari penjarangan yang sudah dilakukan. baik Sandi maupun Sjafrie sama - sama kuat. Hanya saja, yang paling banyak melakukan sosialisasi adalah Sandiaga Uno. Dari lembaga survei yang digunakan oleh tim penjarangan, juga elektabilitasnya Sandi lebih tinggi. Sementara itu, untuk Yusril tidak pernah melakukan sosialisasi.

Pasca itu, kewenangan ada di DPP Partai Gerindra. Para pengurus dan Kader Gerindra di DKI Jakarta menunggu satu bulan, belum ada yang dimunculkan oleh DPP. Ketika Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, diagendakan akan ada deklarasi. Namun, hanya Sandiaga Uno yang diundang. Sementara itu, Sjafrie dan Yusril tidak diundang oleh DPP Partai Gerindra.

"Kalau melihat cara pak Prabowo mengundang, dia nggak mengundang Sjafrie. Dia hanya mengundang Sandi. Berarti Sandi yang akan dideklarasikan dan terbukti Sandi. Tugas penjarangan pun selesai dan sesuai dengan keinginan kader Gerindra DKI Jakarta" (Wawancara Syarif Ketua Tim Penjarangan Tetap DPD Partai Gerindra DKI Jakarta & Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)

Dengan demikian maka proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra dengan melakukan penjarangan merupakan rekrutmen yang bersifat terbuka sebagaimana konsepsi Rush dan Althoff. Rekrutmen politik dengan sifat terbuka berarti sistem perekrutan yang berdasarkan ujian terbuka. Bukan didasarkan pada patronase.

Demikian pula bila dianalisis dengan konsepsi teori yang dikemukakan oleh Lili Romli terkait pola rekrutmen. Munculnya Sandiaga Uno merupakan hasil dari proses pola rekrutmen bermodel rekrutmen terbuka yakni semua warga negara yang memenuhi syarat (seperti kemampuan kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi – posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi yang akhirnya memunculkan Sandiaga Uno yang sudah melakukan sosialisasi hingga 600 titik wilayah, menandakan Sandi cukup unggul dan lebih serius dibandingkan bakal calon lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama Anis Baswedan mulai muncul di Kertanegara yang saat itu Partai Gerindra dan PKS sedang melakukan komunikasi antara Prabowo Subianto dengan Shohibul Iman. Anis yang saat itu, baru saja direshuffle dari Menteri Pendidikan, masuk sebagai salah satu kandidat bakal Cagub DKI Jakarta yang akan diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Masuknya Anis Baswedan tidak lepas dari dua minggu menjelang pendaftaran sudah *senter* kelompok kelompok aliansi strategis. Seperti kelompok Tempo dan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mensosialisasikan namanya Anis Baswedan. Kelompok strategis ini melakukan diskusi kelompok dan memiliki tim survei sendiri. Dari hasil survei mereka, Anis unggul mengalahkan Sandi. Ini tentu berkah bagi Anis Baswedan. Setelah diberhentikan dari jabatan menteri, dia tidak ada pilihan lain. Anis mau kemana lagi setelah diberhentikan. Mayoritas kader dan pengurus Partai Gerindra tetap konsisten menginginkan Sandi sebagai Cagub, ketika itu. Tapi keputusan itu tetaplah menjadi keputusan dan wewenang dari Prabowo Subianto dan Shohibul Iman sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden PKS.

Tiba - tiba malam sekitar pukul 23;30 WIB, H - 2 menjelang penutupan pendaftaran, Jusuf Kalla mengutus orang ke Kertanegara yakni Aksa Mahmud. Aksa bertemu dengan Prabowo dan Shohibul Iman. Pada waktu itu, Aksa menjamin bahwa Anis Baswedan orang baik. Tidak lama kemudian Anis datang ke Kertanegara.

"Pertama kali ketemu Anis. saya sempat nawarin Anis nomer 2. Dia bilangnya mau ketemu pak Prabowo dulu. Setelah ketemu pak Prabowo, saya tanya jadi nomer 2 apa tidak? wajahnya cemberut. Ternyata pak Prabowo tetep Sandi. Tapi ada solusi lain, disuruh berunding sama Sandi. Jangan sampai ada yang terluka. kalau Sandinya legowo ndak masalah Wawancara Syarief Ketua Tim Penjarangan Tetap DPD Partai Gerindra DKI Jakarta & Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)

Prabowo Subianto juga ditelpon oleh Jusuf Kalla (JK). JK tidak mempermasalahkan siapa yang jadi Cagub dan siapa yang jadi Cawagub. sebab keduanya dinilai sudah memiliki hugungan baik, lebih dari sekedar teman yakni sebagai kakak dan adik. Hanya saja harapan JK bila Anis yang menjadi Cagub, itu lebih baik dan lebih berpotensi menang melawan incumbent serta AHY. JK waktu itu juga, menjadi garantor Anis Baswedan kepada Prabowo Subianto dan Shohibul Iman.

Hadirnya JK yang menyodorkan nama Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto dan Shohibul Iman menunjukkan pengaruh elite non partai . Tarik menarik kepentingan lebih terjadi tidak diinternal Partai Gerindra dan PKS. Melainkan dengan elite diluar Partai Gerindra dan PKS. Ditengah pesimisme elite PKS dan Partai Gerindra terhadap Sandi apakah bisa memenangkan pilgub melawan Ahok dan AHY, Jusuf Kalla memberikan angin segar dan harapan politik bagi kedua partai ini.

Keberadaan Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden tentu sangat menguntungkan secara politik bagi kedua partai ini. Terlebih lagi bila ada *deal politik* antara JK dan Prabowo, Jusuf Kalla nantinya mendukung Prabowo Subianto dalam pilpres 2019.

“Siapaapun tidak ada yang tau apakah ada deal politik JK akan mendukung Prabowo dipilpres dengan menerima Anies Baswedan. Ada tidaknya deal politik, hanyalah mereka berdua” (Wawancara Syarief Ketua Tim Penjaringan Tetap DPD Partai Gerindra DKI Jakarta & Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)

Karena itulah, rekrutmen terhadap Anies Baswedan merupakan rekrutmen tertutup dengan kecenderungan oligarki di partai politik. Oligarki dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan partai yang hanya di dominasi oleh kalangan elite.¹ Dengan artian, Anies Baswedan tidak muncul melalui mekanisme yang telah diatur oleh kedua partai politik. Melainkan lebih pada pengaruh dan komunikasi politik antar elite yang dilakukan oleh Jusuf Kalla.

Restu politik istana pun terbelah. Jokowi yang menjabat sebagai Presiden RI secara tersirat lebih mendukung Ahok, sedangkan Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden, lebih mendukung Anies Baswedan.

Menjelang batas akhir waktu pendaftaran semakin dekat dan belum ada keputusan siapa yang akan menjadi Cagub, Ketua Tim Penjaringan Partai Gerindra saat itu menyiapkan 3 formulir pendaftaran yakni. pertama : Sandiaga Uno - Anies Baswedan, kedua Anies Baswedan - Sandiaga Uno, dan ketiga Sandiaga Uno - kosong. Untuk menyelesaikan siapa yang menjadi Cagub dan Cawagub, Sandiaga Uno dan Anies Baswedan bertemu. Mereka melakukan sholat subuh berjamaah berdua.

"Entah apa yang mereka bicarakan pada akhirnya keduanya bersepakat maju Anies yang menjadi Cagub dan Sandi menjadi Cawagub. Keduanya ke kertanegara menemui Prabowo Subianto dan Shohibul Iman dan mereka menyetujuinya (Wawancara Syarief Ketua Tim Penjaringan Tetap DPD Partai Gerindra DKI Jakarta & Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)"

Segala keputusan menjadi kewenangan Prabowo Subianto (ketua umum Partai Gerindra) dan Shohibul Iman (Presiden PKS) dalam menentukan sikap partai di Pilkada tahun 2017. Keputusan yang diambil telah dilalui oleh banyak perdebatan, mengurus tenaga dan dinamika politik yang sangat panjang. Walaupun masih menimbulkan tanda tanya dikalangan kader Gerindra, sebab

¹ Lili Romli, dkk, *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*, Depok : Puskapol UI, 2008, hlm 24

Anis Baswedan merupakan lawan politik dari Prabowo Subianto, semua pihak menyetujui. Setiap keputusan yang sudah diputuskan menjadi tanggung jawab seluruh kader partai di Jakarta untuk mematuhi dan berusaha memenangkannya. Termasuk dalam keputusan yang dibuat mengenai sikap mengukung Anis - Sandi. Perdebatan yang terjadi dan dinamika politik dinternal partai dan dalam melakukan koalisi dapat menjadi sebuah konsolidasi partai baik bagi Partai Gerindra maupun PKS dalam menghadapi pelaksanaan pilkada.

Keputusan untuk mengukung pasangan Anis dan Sandi sebagai Cagub dan Cawagub untuk mengikuti pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akhirnya telah ditentukan oleh Partai Gerindra dan PKS. Dalam hal ini, keduanya seperti tidak mempermasalahkan siapa figur (dari sisi etnis) yang diusung. Yang terpenting hanyalah dapat mengukung Cagub - Cawagub dan keduanya memang fokus untuk memperbaiki DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari pernyataan Prabowo sendiri yang menginginkan adanya karakter kepemimpinan yang berimbang dipemerintahan DKI Jakarta nantinya.

Kesimpulan

Rush dan Althoff, yang menilai rekrutmen politik memiliki dua sifat, yakni terbuka dan tertutup berlaku dan kontekstual dengan penelitian ini. Sebab pada dasarnya Partai Gerindra melakukan sistem rekrutmen secara terbuka dengan berdasarkan pada ujian - ujian terbuka melalui penjangkaran bakal calon. Hanya saja bakal calon gubernur yang didaftarkan ke KPUD tidak melalui proses penjangkaran. Sehingga dapat dikatakan, rekrutmen terhadap Anis Baswedan yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera adalah rekrutmen yang bersifat sistem tertutup, yakni sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. Sementara itu, rekrutmen terhadap Sandiaga Uno bersifat terbuka karena berdasarkan ujian – ujian terbuka kepada publik melalui sistem penjangkaran yang dilakukan oleh Partai Gerindra.

Demikian pula mengenai teori Lili Romli mengenai pola rekrutmen yang dibaginya menjadi dua yakni model terbuka dan model tertutup, juga relevan dengan penelitian ini. Rekrutmen terhadap Sandiaga Uno merupakan model rekrutmen terbuka sebab Sandi melalui proses penjangkaran diinternal Partai Gerindra dan bersaing dengan tokoh lainnya agar bisa diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan rekrutmen terhadap Anis Baswedan pola rekrutmennya bermodel tertutup sebab dilakukan oleh sekelompok elite memanfaatkan hubungan politik antara Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto.

Berbicara elit dalam sebuah partai politik, maka kelompok ini dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar, artinya bahwa mereka bukan orang biasa saja. Para elit merupakan orang yang memiliki kedudukan dan juga jabatan yang kuat dalam suatu struktur partai politik. Ketua umum partai politik di tingkat pusat biasanya dapat disebut seorang elite politik.

Dan konsepsi elit Nazaruddin Syamsuddin yang mendefinisikan elite politik adalah elitnya para politisi yaitu tokoh puncak diantara para pelaku kegiatan politik, kontekstual dalam penelitian ini. Prabowo Subianto dan Shohibul Iman sebagai Ketua Umum dan Presiden dipartainya masing – masing merupakan elitnya para politisi diinternal partainya.

References

Buku

- Lili Romli et al. 2008. *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*, Depok : Puskapol UI.
- _____. 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3.
- Michael Rush dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, Erik Purnama. 2014. *Anies Sebut Prabowo-Hatta Diusung Para Mafia*. Online [dalam] <https://republika.co.id/berita/n84bkl/anies-sebut-prabowohatta-diusung-para-mafia> diakses pada 29 Juli 2019.
- Sugiyana, Aritasius dan Sinta Ratnawati. 2017. *Buku Pintar Kompas Tahun 2016*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Wawancara Syarif Ketua Tim Penjaringan Tetap DPD Partai Gerindra DKI Jakarta & Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.